

# Penyempurnaan Pedoman Penyusunan SLHD

Asdep Data dan Informasi Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup

(Berdasarkan masukan dari unit-unit kerja di KLH)

# **HASIL PENGEMBANGAN SEMENTARA**

# Tabel Sumber Daya Alam

## 1. Luas Lahan Kritis:

Untuk membedakan perlu penambahan pada lahan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan

No.	Kabupaten/Kota	Dalam Kawasan Hutan			Luar Kawasan Hutan		
		Kritis (Ha)	Sangat Kritis (Ha)	Jumlah Total (Ha)	Kritis (Ha)	Sangat Kritis (Ha)	Jumlah Total (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total							

# Tabel Sumber Daya Alam

## 2. Evaluasi Kerusakan Tanah

Penambahan pada lokasi pemantauan, Luas lahan, titik koordinat dan titik sampling, sesuai Peraturan Pemerintah No. 150/2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa

Khusus untuk evaluasi kerusakan tanah hanya dilakukan oleh Kab/Kota

No.	Parameter	Ambang Kritis	Titik Sampling				Status
			Titik 1	Titik 2	Titik 3	Titik 4	Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)
	<i>Lokasi Pemantauan</i>						
	<i>Luas Lahan</i>						
	<i>Koordinat</i>						
1	Subsistensi Gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut ≥ 3 m atau 10% / 5 tahun untuk ketebalan gambut < 3 m					
2	Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan tanah	< 25 cm dengan pH ≤ 2,5					
3	Kedalaman Air Tanah dangkal	> 25 cm					
4	Redoks untuk tanah berpirit	> - 100 mV					
5	Redoks untuk gambut	> 200 mV					
6	pH (H <sub>2</sub> O) 1 : 2,5	< 4,0 ; > 7,0					
7	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm					
8	Jumlah mikroba	< 10 <sup>2</sup> cfu/g tanah					

# Tabel Sumber Daya Alam

2. Untuk memudahkan tabel Flora dan Fauna diisikan dengan tanda baca (v)

No.	Golongan	Nama spesies Diketahui	Endemik		Status	
			Ya	Tidak	Teranca	Berlimpah
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
1.	Hewan menyusui/Mamalia	1.				
		2.				
		3.				
		dst..				
	Jumlah					



## Lanjutan

6. Kualitas air sungai sesuai dengan PP. 82/2001 menjadi perlu untuk semua parameter termasuk parameter tambahan untuk dilakukan pemantauan
7. Tabel terpisah untuk hasil pemantauan yang menjadi kewenangan provinsi dan hasil pemantauan dari dana Dekonsentrasi

8. Adanya draft Permen mengenai Perlindungan Mata Air maka perlu penambahan tabel inventarisasi mata air

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Mata Air</b>
(1)	(2)	(3)





# 10. Kualitas mata air mengacu pada Permenkes No. 907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang syarat pengawasan kualitas air

No	Parameter	Satuan	Titik Sampling						
			1	2	3	4	5	dst	
(1)	(2)	(3)	(4)						
	Nama Sungai								
	Hulu/Hilir								
	Nama Lokasi								
	Kode Titik								
	Kordinat +/- ° ' " (Lintang) ° ' " (Bujur Timur)								
	Km dari Muara								
Data Mata Air	Cuaca								
	Musim								
	Tanggal Pengambilan Sampel								
	Tanggal Analisis								
	Debit min/max	m3/detik							
	<b>FISIKA</b>								
1	Tempelatur	°C							
	<b>KIMIA ANORGANIK</b>								
4	BOD								
5	COD	mg/L							
6	DO	mg/L							
7	pH	mg/L							
8	TSS	mg/L							
9	TDS	mg/L							
10	Total Fosfat	mg/L							
11	Fecal Coli Total Coli	mg/L							
12	Nitrat (NO3)	mg/L							
13	NH3-N	mg/L							
14	Minyak dan Lemak	mg/L							
15	Detergen sebagai MBAS	mg/L							
16	Senyawa Fenol	µg/L							

# 10. Kualitas air sumur mengacu pada Permenkes No. 907/MENKES/SK/VII/2002

No	Parameter	Satuan	Lokasi Sampling					
			1	2	3	4	5	dst
(1)	(2)	(3)	(4)					
Data Sumur	Nama Lokasi							
	Koordinat							
	Waktu Pemantauan							
	<b>Fisika</b>							
1	Bau							
2	Jumlah zat padat terlarut (TDS)	Mg/L						
3	Kekeruhan	Skala NTU						
4	Rasa							
5	Suhu	0°C						
6	Warna	Skala TCU						
	<b>KIMIA Anorganik</b>							
1	Air Raksa	jml/100 ml						
	Arsen	Mg/L						
2	Besi							
3	Flourida	Mg/L						
4	Kadmium	Mg/L						
5	Kesadanan	Mg/L						
6	Klorida	Mg/L						
7	Kronium, valensi 6	Mg/L						
8	Mangan	Mg/L						
9	Nitrat, sebagai N	Mg/L						
10	Nitrit, sebagai N	Mg/L						
11	pH	Mg/L						
	Selenium	Mg/L						
12	Seng	Mg/L						
13	Sianida	Mg/L						
14	Sulfat	Mg/L						
15	Timbal	Mg/L						
	<b>Kimia Orgaik</b>							
16	Detergent	Mg/L						
	<b>Mikrobiologi</b>							
17	MPN (Golongan Coliform)	Jumlah per 100 ml						

11. Kualitas mutu air laut mengacu pada  
KemenLH No. 51 Tahun 2004. Tabel terpisah:

- Untuk perairan pelabuhan
- Untuk wisata bahari
- Untuk biota laut

12. Kualitas udara ambien mengacu pada  
PP 41/1999

## lanjutan

13. Untuk analisis pada laporan SLHD sesuai dengan tahun data maka data pada tabel curah hujan digunakan adalah data akumulasi curah hujan bulanan untuk satu tahun.
14. Untuk kualitas air hujan blm ada acuannya sehingga diusulkan untuk ditiadakan.

# Tabel Sumber Pencemar

1. Tabel Jumlah Jenis Industri/Kegiatan Usaha diperjelas dengan menambahkan Point Source dan Non Point Source

No.	Jenis Industri	Produksi (Ton/Tahun)	Point Source	Non Point Source	Beban Limbah Cair (Ton/Tahun)			
					BOD	COD	TSS	Lainnya
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)
1.								
2.								
3.								
4.								
Total								







# Tabel Upaya Pengelolaan Lingkungan

1. Perubahan pada tabel dokumen ijin lingkungan :

No.	Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Nama Pemrakarsa	Kapasitas Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Potensi Dampak yang timbul	Tanggal Penerbitan Ijin	Perizinan PPLH yang dibutuhkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
dst							

## 2. Perubahan pada tabel Pengaduan masyarakat :

No.	Kab/Kota	Jumlah pengaduan yang diterima	Jumlah yang ditangani	Status/penegakan hukum yang diterapkan
(1)	(2)	(3)		
dst				

2. Penambahan informasi mengenai organisasi bidang lingkungan hidup tidak hanya LSM tetapi bentuk lainnya. Untuk mengetahui peran organisasi tersebut maka diperlukan rencana aksi dan realisasi aksi dr organisasi tsb.

No.	Nama Organisasi/Yayasan/Kelompok/LSM	Alamat	Rencana Aksi	Realisasi Aksi
(1)	(2)	(3)		
Dst				

# Agenda

1. Data yang disampaikan melalui Buku Data SLHD adalah data agregat sedangkan untuk data mikro LH dikelola melalui aplikasi/infrastruktur SILH.
2. Data sektor sebagai pendukung analisis ditampilkan dalam buku analisis dan tidak ditampilkan dalam buku data

3. Akan ada pedoman penyusunan laporan SLHD dan pedoman pemanfaatan Modular Tematik SLHD (pada aplikasi/infrastruktur SILH) untuk pengelolaan data LH
4. Koordinasi dengan provinsi untuk kesepakatan penerapan pedoman penyusunan baru.
5. Tahun 2014 bridging, 2015 implementasi tahap awal.

# Pertimbangan terhadap Penilaian Laporan SLHD

1. Penilaian terhadap Laporan SLHD menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan SILH di daerah
2. Beberapa pertimbangan lain yang mungkin akan digunakan
  1. Bagaimana aliran data dan tata kelola data melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup
  2. Bagaimana budaya data dan budaya elektronik dapat dilaksanakan
  3. Penyediaan prasyarat penyelenggaraan SILH